

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA KARANGAN
HILIR DALAM PELESTARIAN KEBUN DAN HUTAN
STIPER KUTAI TIMUR**



**JERLITA KADANG ALLO
MUFTI PERWIRA PUTRA**

**SEKOLAH TINGGI PERTANIAN KUTAI TIMUR
SANGATTA
2019**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	2
C. Manfaat Penelitian	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
B. Bahan dan Alat Penelitian	15
C. Obyek Penelitian	15
D. Prosedur Penelitian	16
1. Orientasi Lapangan	16
2. Penentuan Jumlah Responden.....	16
3. Metode Pengumpulan data.....	17
4. Analisis Data	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa mempunyai hutan hujan tropis yang luas dan lebat. Di samping itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman plasma nutfah yang sangat beragam, yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan tidak saja penting bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia pada umumnya. Namun demikian, hutan di Indonesia tergolong hutan tropis yang sangat dikhawatirkan keberadaannya (eksistensinya) secara lestari. Ini dikarenakan adanya tekanan-tekanan yang semakin lama semakin bertambah berat, seperti adanya penebangan-penebangan tanpa perhitungan matang yang tentunya akan merusak kelestarian hutan (Arief, 1994).

Faktor utama kerusakan tersebut secara umum adalah antara lain berupa atau disebabkan oleh adanya gangguan manusia. Pada awalnya lebih dikenal sebagai eksploitasi kayu yang berlebihan, tetapi selanjutnya juga akibat dari perambahan kawasan untuk pemukiman dan kegiatan pertanian serta pembalakan liar. Bahkan dalam dasawarsa terakhir konversi hutan ke areal perkebunan dan pertambangan juga dipertimbangkan sebagai ancaman potensial terjadinya deforestasi hutan di Indonesia.

Partisipasi dari seluruh unsur masyarakat lokal dalam program pembangunan akan memberikan pengalaman dan rasa memiliki yang pada tahap berikutnya akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk mempertahankan hasil-hasil program secara dinamis (Mujahiddin dkk., 2006).

Partisipasi adalah pelibatan secara aktif pihak dalam atau pihak luar dalam seluruh keputusan yang terkait dengan sasaran, tujuan dan kegiatan, maupun dalam implementasi kegiatan itu sendiri (David-Case, 1990 dalam Sardjono, 2004). Kemudian Pranoto (2001), mendefinisikan masyarakat lokal sebagai istilah yang sering digunakan untuk masyarakat yang berada di dalam ataupun di sekitar hutan.

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan akan meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap lingkungan kawasan hutan. Dalam hal ini, masyarakat tidak dipandang sebagai obyek yang perlu dibina, tetapi juga merupakan pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk perlindungan yang lestari dari suatu kawasan. Atau dengan perkataan lain juga sebagai “pelaku pelestarian kawasan hutan”. Karena itu diperlukan peran masyarakat lokal baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi.

Dalam rangka melihat seberapa besar partisipasi masyarakat dalam turut menjaga dan melestarikan kebun dan hutan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur, maka perlu mengetahui partisipasi masyarakat lokal yang dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan kunci dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (1). Dalam hal apa mereka dapat/ akan berpartisipasi (fungsi partisipasi)?
- (2). Bagaimana partisipasi mereka (Intensitas partisipasi)?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi partisipasi dan intensitas partisipasi unsur masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan Kebun dan hutan STIPER Kutai Timur.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai bahan masukan/ rujukan bagi STIPER Kutai Timur dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam program pengelolaan kebun dan hutan STIPER
2. Bagi masyarakat; sebagai acuan dan sumber informasi yang dapat melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mereka berpartisipasi dalam program perlindungan hutan khususnya di kebun dan hutan STIPER Kutai Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. FUNGSI DAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Anonim, 1999).

Hutan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini, terutama bagi kehidupan generasi mendatang. Kesalahan dalam pengelolaan hutan berarti menyiksa kehidupan generasi mendatang. Untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan hutan, maka fungsi hutan harus dipelajari dan dimengerti secara utuh (Arief, 2001).

Selanjutnya Arief (2001) menyatakan, bahwa tujuan pembangunan kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan terhadap pengelolaan yang terdiri atas pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomi dan ekologi yang sama kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi. Saat sekarang telah ditetapkan bahwa pembangunan kehutanan dan perkebunan dititikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya kebun dan hutan pada kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang.

Menurut Undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan sebaran yang proporsional.

- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan mikro yang menyangkut hutan adalah menetapkan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan suaka margasatwa langkah ini dinamakan sebagai penetapan kawasan hutan menurut fungsinya (Simon, 2001). Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yang terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Oleh karena itu, hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung. Pada Pasal (1) Undang-undang No 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) ternyata juga dinyatakan:

- a. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- b. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

- c. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

B. MASYARAKAT

Von Maydell (1989), mengelompokkan masyarakat lingkungan hutan menjadi dua bagian besar yaitu:

- (1). Masyarakat di dalam kawasan hutan (forest dwellers) yang dapat dikatakan sebagai komponen alami dari ekosistem hutan karena sudah turun temurun tinggal di dalam hutan, meski tidak memiliki tempat tinggal tetap.
- (2). Masyarakat di lingkungan hutan (rural people), yang merupakan masyarakat yang tinggal secara tetap (“desa”), baik di dalam ataupun di sekitar hutan.

Di dalam dunia kehutanan juga dikenal istilah masyarakat lokal (local society) dan istilah masyarakat lokal ini menurut Pranoto (2001), sering digunakan untuk masyarakat yang berada di dalam ataupun di sekitar hutan. Poli (1997) dalam Sutrisno (2004) menyatakan, bahwa unsur-unsur masyarakat lokal adalah: (1) sejumlah orang, (2) tempat, (3) cukup lama sehingga menghasilkan dan (4) Common way of life.

Menurut Simpoha (1998), yang dimaksud masyarakat lokal/setempat, yaitu kelompok masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan dan berinteraksi dengan hutan sejak turun temurun. Mereka adalah masyarakat asli yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat dan atau masyarakat adat.

Selanjutnya Simpoha (1998) menyatakan, bahwa masyarakat lokal/setempat dapat terdiri dari:

- (1). Masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang teratur bersifat tetap, mempunyai keluasan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
- (2). Masyarakat adat yaitu masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan yang statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.
- (3). Masyarakat campuran (termasuk pendatang), yang oleh karena perkembangan kemajuan sebagai negara kesatuan telah menyebabkan terjadinya perpindahan warga masyarakat dari tempat lain ke dalam dan di sekitar hutan, baik oleh karena program pemerintah (transmigrasi, permukiman kembali) maupun kehendak atau prakarsanya sendiri.

Soemarwoto (1987) menyatakan, bahwa masyarakat lokal/tradisional secara umum mempunyai pola pikir yang imanen, yang mana mereka memandang sumberdaya alam termasuk hutan di dalamnya tidak terpisahkan dari sistem sosial karena keduanya merupakan komponen ekosistem, pemanfaatan yang berlebihan apalagi merusak akan memusnahkan kehidupan mereka sendiri. Uluk dkk. (2001) menyebutkan, misalnya dalam kasus masyarakat Dayak di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang sangat tergantung pada berbagai kepentingan antara lain: sebagai sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, sumber penghasilan

uang tunai, upacara dan kebudayaan, serta sebagai sumber bahan baku untuk perlengkapan sehari-hari, juga untuk memperoleh kayu bakar. Hutan juga merupakan kebutuhan masyarakat secara langsung dan secara tidak langsung.

Undang-undang Nomor: 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) Pasal 70 dinyatakan:

- 1) Ayat (1) masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan;
- 2) Ayat (2), Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
- 3) Ayat (3), dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu forum pemerhati kehutanan.

Memperhatikan isi Pasal 70 tersebut di atas jelas sekali bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kehutanan sangat lah mendapat perhatian.

Di samping itu Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan kehutanan di Indonesia harus berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan. Pesan ini sesungguhnya menunjukkan paradigma baru dalam penyelenggaraan kehutanan yang mewajibkan pengelolaan hutan yang benar dalam berbagai hal, yaitu menurut Sutisna (2000) adalah sebagai berikut:

- (1). Hutan harus bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai fungsi hutan tersebut (lindung, produksi, konservasi).

- (2). Manfaat hutan bukan hanya dapat dinikmati masyarakat sesaat melainkan harus berkelanjutan. Baik dalam hal nilai ekonomis maupun nilai-nilai lainnya (estetika, ilmiah, budaya). Artinya bila ada kawasan hutan yang rusak, maka generasi sekarang berkewajiban memperbaikinya sampai menjadi produktif kembali dalam fungsi utamanya.
- (3). Penyelenggaraan kehutanan tidak dapat ditentukan dan atau dilakukan sepihak oleh pemerintah yang mewakili negara seperti di masa lalu, melainkan harus bersama masyarakat secara berkeadilan terpadu.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 1984). Ditambahkan lagi oleh David-Case (1990) dalam Sardjono (2004), partisipasi adalah pelibatan secara aktif pihak dalam atau pihak luar dalam seluruh keputusan yang terkait dengan sasaran, tujuan dan kegiatan, maupun dalam implementasi kegiatan itu sendiri.

Terdapat beberapa pengertian partisipasi (masyarakat) didasarkan pada berbagai sumber yang berbeda sebagai berikut:

- (1). Misra (1984) yang dikutip Margiyono (1999) menyatakan, apabila dikaitkan dengan upaya mendukung program pemerintah, pengertian partisipasi adalah keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam implementasi kegiatan, namun juga dalam pengambilan keputusan dan turut menikmati hasil keuntungan yang diperolehnya dari suatu program/proyek.

- (2). Sembiring dkk. (1999) menyatakan, definisi partisipasi bila dikaitkan dengan peranan masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat di dalam urusan pembangunan, baik secara perorangan maupun dalam bentuk kelembagaan dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
- (3). Canter (1997) dikutip Pranoto (2001), definisi partisipasi masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas pengelolaan suatu kawasan.

Hasil penelitian Sutrisno dkk. (2006) menyatakan, bahwa persepsi masyarakat lokal tentang apa partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam berbagai kegiatan
- b. Berperan serta dalam tahapan kegiatan
- c. Sumbangan baik yang bersifat fisik dan non fisik

Selanjutnya juga dinyatakan bahwa alasan mereka tidak berpartisipasi adalah (a) tidak dilibatkan, (b) tidak ada pemberitahuan, (c) tenaga kerja yang direkrut berasal dari luar, (d) memiliki pekerjaan rutin, (e) ketidakberdayaan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk memahami istilah partisipasi, diperlukan beberapa kriteria yang tersimpul dalam istilah partisipasi itu sendiri (Adjid, 1985). Beberapa kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi mengacu kepada adanya beberapa subjek yang berinteraksi seperti individu, masyarakat, organisasi, perekonomian dan pemerintah yang masing-masing mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri tetapi dalam ikatan solidaritas tertentu.
- b. Terdapat kesukarelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peran yang diberikan organisasi secara ikhlas
- c. Partisipasi bermakna kepada keterlibatan anggota masyarakat dalam proses suatu kegiatan
- d. Adanya kelompok sasaran (target-target) dari suatu kegiatan yang menjadi ajang partisipasi.

Meningkatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat lokal berbeda peranannya, maka menurut Poli (1997) dalam Sutrisno (2004), terdapat tiga aspek dalam pengertian partisipasi yaitu:

- (1). Luasnya partisipasi (siapa yang berpartisipasi): pemimpin saja, kelompok minat, keseluruhan kepala keluarga, wanita, pemuda/anak-anak.
- (2). Fungsi partisipasi (dalam hal apa partisipasinya): apakah dalam hal distribusi/penggunaan, pemeliharaan, pelaksanaan, perencanaan atau manajemen.
- (3). Intensitas partisipasi (bagaimana partisipasinya): memberikan informasi, memberikan konsultasi, pengambilan keputusan, memprakarsai tindakan, pengendalian total.

2. Bentuk Partisipasi

Menurut Cormick (1979) dalam Sembiring dkk. (1999), partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, partisipasi yang bersifat konsultatif yang mana anggota masyarakat punya hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, tetapi keputusan terakhir tetap di tangan pembuat kebijakan/keputusan. Kedua, partisipasi yang bersifat kemitraan, yang mana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan dan secara bersama-sama pula membuat keputusan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Margiyono (1999), ada empat macam bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan (decision making), partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan (implementation), partisipasi dalam menerima manfaat dan hasil-hasil pembangunan (benefit) dan partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan (monitoring and evaluation).

Tjokroamidjo (1987) yang dikutip Margiyono (1999), membagi partisipasi dalam tiga bentuk, yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan bersama-sama pemerintah. Kedua, partisipasi dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ketiga, partisipasi pada keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

3. Tingkat Partisipasi

Menurut Arnstein (1969) yang dikutip Arimbi dan Santosa (1993), peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapat keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat tipologinya yang dikenal dengan: delapan tangga peran serta masyarakat (eight rungs on the ladder of citizen participation). Selanjutnya dijelaskan penjabaran peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai “non peran serta”, dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan: (1) terapi; (2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang berperan serta. Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu tingkat peran serta yang mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Termasuk dalam tingkat “Tokenisme” adalah: (3) penyampaian informasi (informing); (4) konsultasi (consultation); dan (5) peredaman kemarahan (placation). Selanjutnya dikategorikan tiga tangga teratas dalam tingkat “kekuasaan masyarakat” (citizen power) masyarakat dalam tingkat ini memiliki pengaruh dalam penproses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) Kemitraan (partnership) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama penguasa atau pada tingkat yang lebih tinggi, (7) pendelegasian kekuasaan (delegated power), dan (8) pengawasan masyarakat (citizen power).

Pada tingkat ketujuh dan kedelapan masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara dalam pengambilan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijaksanaan tertentu.

4. Tipe-tipe Partisipasi

IIED (1984) dalam Sardjono (2004) menyebutkan ada beberapa tipe partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi pasif (passive participation)

Masyarakat berperan serta melalui pemberitahuan dan arahan dari satu sisi (penyelenggaraan proyek dan program kegiatan pemerintah dan perusahaan).

b. Partisipasi dalam pemberian informasi (participation in information giving)

Masyarakat berperan dengan sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehubungan dengan suatu kebijakan proyek dan program kegiatan.

c. Partisipasi dengan konsultan (participation by consultation)

Masyarakat di sini berperan serta dengan memberikan saran-saran dan pandangan atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam rangka suatu proyek dan program kegiatan.

d. Partisipasi untuk intensif materi (participation for material incentives)

Masyarakat berpartisipasi dengan pemberian kompensasi atas jasa yang diberikan atas suatu kebutuhan (misalnya suatu proyek atau program kegiatan).

e. Partisipasi secara fungsional (functional participation)

Masyarakat berperan serta dengan membentuk kelompok-kelompok kecil guna memenuhi tujuan proyek dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

f. Partisipasi interaktif (interactive participation)

Masyarakat berperan serta dalam analisis bersama pelaksanaan proyek dan program kegiatan melalui upaya memfungsikan peran kelembagaan yang sudah ada di masyarakat. Tipe ini umumnya digunakan saat ini.

g. Mobilisasi secara mandiri (self mobilization)

Masyarakat berperan dalam suatu proyek dan program kegiatan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa tergantung dengan pihak luar.

Partisipasi dari seluruh unsur masyarakat lokal dalam program pembangunan akan membuktikan pengalaman dan rasa memiliki yang pada tahap berikutnya akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk mempertahankan hasil-hasil program secara dinamis (Mujahiddin dkk., 2006).

Partisipasi aktif dari seluruh unsur masyarakat lokal dalam program pembangunan akan menumbuhkan pengalaman dan rasa memiliki yang pada tahap berikutnya akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemauan untuk mempertahankan hasil-hasil program secara dinamis (Margiyono, 1999).

D. HUTAN PENDIDIKAN

Pengertian hutan pendidikan adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pejabat atau pihak terkait lainnya sebagai kawasan hutan yang diperuntukan sebagai hutan pendidikan. Dalam hal ini sebagai wahana bagi masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari hutan dan hubungan timbal balik antar komponen ekosistemnya (Anonim, 2018).

Fungsi dari hutan pendidikan ini secara spesifik sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa terkait hutan
2. Memberikan alternatif lokasi bagi para peneliti hutan dan lingkungan
3. Memberi kesempatan lebih lebar dalam kajian terhadap hutan
4. Memberi ruang terhadap pengembangan hutan
5. Menjadi fasilitas lebih dalam dunia pendidikan kehutanan

Adanya hutan pendidikan diharapkan menjadi laoratotium raksasa terkait sumberdaya alam hutan. Keadaan lingkungan alam secara mutlak di pengaruhi oleh keberadaan hutan, oleh sebab itu hutan menjadi bagian terpenting di muka bumi ini (Anonim 2018).

Hutan Pendidikan merupakan instrumen pokok untuk Program Studi Ilmu Kehutanan berkaitan dengan praktek langsung di lapangan sesuai teori yang telah diperoleh di dalam ruang kuliah. Ketersediaan hutan pendidikan sangat penting guna menunjang keterampilan & membangun kompetensi bagi lulusan (Leony Tanudjaja ,2017).

III. METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di desa Karang Hilir Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur. Adapun waktu pelaksanaannya mulai bulan Februari - Desember 2019

B. BAHAN DAN ALAT PENELITIAN

Bahan dan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1). Kuesioner, digunakan untuk mendapatkan data primer dari responden yang merupakan data utama untuk dianalisis dalam penelitian ini.
- (2). Peta-peta serta dokumen-dokumen berbagai laporan lainnya berkaitan dengan Kebun dan hutan STIPER Kutai Timur, digunakan sebagai sumber informasi pendukung/ sekunder.
- (3). Kamera merek Samsung 12,2 megapixels, digunakan untuk mendokumentasikan obyek-obyek penting di lapangan yang terkait dengan ruang lingkup tesis guna mempermudah pembahasan.
- (4). Tape recorder, digunakan untuk merekam informasi saat dilakukan wawancara sehingga dapat dipastikan tidak ada informasi responden yang hilang.

C. OBYEK PENELITIAN

Obyek utama penelitian ini adalah:

- (1). Kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar dan kehidupannya memiliki keterkaitan langsung dengan Kebun dan hutan STIPER Kutai Timur

(2). Tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan pihak pengelola

D. PROSEDUR PENELITIAN

1. Orientasi Lapangan

Orientasi lapangan dilaksanakan untuk mengetahui gambaran dan keadaan umum dari lokasi penelitian.

2. Penentuan Jumlah Responden

a. Pemilihan desa

Pemilihan desa ditetapkan secara purposive sampling dengan kriteria desa yang berada terdekat lokasi kebun dan hutan STIPER Kutai Timur. Untuk itu ditetapkan/ dipilih desa Karangany Hilir.

b. Responden

Responden diambil dari lokasi penelitian yang dijadikan sampel dan ditentukan dengan cara stratified sampling yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan membagi populasi dalam beberapa strata sesuai dengan tuntutan rumusan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Strata (kelompok) populasinya adalah a) pemimpin, b) kelompok minat, c) kepala keluarga, d) wanita dan e) pemuda, dengan jumlah responden setiap desa sebanyak 30 orang. Jumlah sampel tersebut ditetapkan berdasarkan Lestari (2004) yang menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian yang menggunakan metode deskriptif-korelasional, minimal adalah 30 subyek.

3. Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada responden dengan bantuan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari perusahaan dan instansi terkait, berupa dokumen antara lain laporan tahunan, data kependudukan, literatur, dan data-data/ laporan-laporan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Data primer meliputi partisipasi masyarakat dan identitas/ profile masyarakat seperti umur, jenis kelamin, asal, pendidikan, pekerjaan, status, jumlah keluarga, sumber mata pencarian dan pendapatan. Data sekunder meliputi luas wilayah hutan dan kebun, iklim, topografi, luas desa, jumlah penduduk, prasarana desa dan kelembagaan desa.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tentang tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga dan mel;estarikan kebun dan hutanSTIPER Kutai Timur, didasarkan pada perkalian angka indeks pelaku (who), dengan angka indeks dalam hal apa (what) dan angka indeks bagaimana partisipasi (how), sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1 . Participation-Empowerment Index

Extent (who)	Function (in what)	Intensity (how)
5. Youth	5. Management	5. Total control
4. Women	4. Planning	4. Initiation action
3. All households	3. Implementation	3. Decision making
2. Interest group	2. Maintenance	2. Consultation
1. Leader only	1. Distribution / use	1. Informing

Sumber : Shubert (1996) dalam Sumantri (2000)

Keterangan : angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah indeks.

Berdasarkan perkalian tersebut diperoleh angka tertinggi 125 dan angka terendah 1. Kemudian untuk memberikan skala penilaian tingkat partisipasi masyarakat lokal dari nilai terendah sampai tertinggi dengan pembagian kelompok sebanyak 5 kelompok dengan kategori: (a) sangat tidak aktif, (b) tidak aktif, (c) cukup aktif, (d) aktif dan (e) sangat aktif, dilakukan dengan cara menurut Sudjana (1992), sebagai berikut:

Dengan demikian pengkategorian partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga dan melestarikan kebun dan hutan STIPER Kutai Timur adalah sebagai berikut:

- a) Partisipasi sangat tidak aktif, jika nilai indeks nya 1-25
- b) Partisipasi tidak aktif, jika nilai indeks nya 26-50
- c) Partisipasi cukup aktif, jika nilai indeks nya 51-75
- d) Partisipasi aktif, jika nilai indeks 76-100
- e) Partisipasi sangat aktif, jika nilai indeks 101-125

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak dan Aksesibilitas

Desa Karangany Hilir yang terletak di kecamatan Karangany Kabupaten Kutai Timur. Desa Karangany Hilir merupakan desa pemekaran dari desa Karangany Dalam sesuai dengan SK Bupati Kutai Timur nomor : 226/02.188.45/HK/VII/2005 tanggal 6 juli 2005. Desa ini terletak pada jalan poros Kabupaten Berau dengan luas 458 kilo meter persegi. Untuk menuju ke desa ini dapat ditempuh melalui jalur darat dari ibu kota Sangatta sekitar 6 jam dengan jarak tempuh 196 km. Desa Karangany Hilir memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a.) Sebelah Utara berbatasan dengan IUPHHK PT Kedungmadu Tropical Wood
- b.) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Lepoq
- c.) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Karangany Seberang
- d.) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Karangany Dalam

Secara geografis, letak desa Karangany Hilir sangat strategis karena didukung oleh beberapa infrastruktur penunjang seperti: adanya jalan poros trans Kalimantan, dikelilingi oleh beberapa perusahaan perkebunan sawit. Kantor-kantor instansi pemerintahan seperti, kantor desa berada pada lokasi yang sama, sehingga sangat memudahkan warga ketika membutuhkan layanan kemasyarakatan.

Dari segi tata ruang, desa Karangany Hilir sangat tertata dalam hal pembangunan (rumah) maupun jalan atau gang serta sarana-sarana lainnya)

Kondisi desa yang bersih dan tertata rapi, membuat desa ini beberapa kali menerima penghargaan dari pemerintah daerah. Rata-rata bentuk rumah di desa Karangany Hilir adalah sebagian besar rumah yang terbuat dari kayu. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini, maka para dewan adat, perangkat desa dan segenap masyarakat serta adanya campur tangan pemerintah, dalam membuat perbaikan tata ruang desa yang hasilnya sampai sekarang masih terjaga. Pada saat ini desa Karangany Hilir terdiri atas 9 RT, salah satunya adalah RT 08 yang dikenal sebagai tempat wisata, hal ini didukung oleh berbagai aset budaya yang masih dijaga dan dibudayakan walaupun dari segi kehidupan masyarakatnya atau yang disebut juga sebagai masyarakat campuran sudah mengalami kemajuan. Desa Karangany Hilir, Desa tersebut merupakan salah satu desa binaan STIPER dengan harapan bisa memaksimalkan hutan yang ada. Luasan kebun hutan pendidikan STIPER \pm 21 Ha dengan berbagai jenis flora dan fauna.

2. Flora dan Fauna

Kebun dan Hutan Pendidikan STIPER merupakan suatu kawasan/landskap yang memiliki fenomena alam yang sangat menarik dilihat dari segi karts dan pemanfaatan, khususnya pengelolaan ekowisata karena banyak faktor-faktor pendukung lain di luar dari kebun STIPER, misalnya mata air yang berasal dari karts, tempat permandian yang sangat menakjubkan karena antara air panas dan air dingin jaraknya hanya dibatasi gundukan tanah dengan jarak \pm 1 meter, sedangkan air hangat masih berada pada kawasan permandian air panas dan air dingin. Kawasan tersebut terdapat di desa Karangany Hilir KM 15 arah jalan Kelayuan dengan ketinggian \pm 25 mdpl serta luasan \pm 21 Ha dengan berbagai

jenis vegetasi yang alami dan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh pada kawasan tersebut contohnya, Kapur (*Dryobalanopsaromatica*), Aren, (*Arengapinata*), Kenanga (*Canagaodorata*), Jelutung (*Dyeraacostulata*), Beringin (*Ficusbenjamina*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan lain-lainnya. Tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai tempat untuk berlindungnya berbagai jenis-jenis makluk hidup seperti Monyet ekor panjang (*Macaca Fascicularis*), Tupai (*Tupaia gracilis*), Kupu-kupu (*Rhopalocera*), Burung Enggang (*Buceros vigil forester*) dan jenis lainnya.

3. Kependudukan

Mayoritas Masyarakat Sekitar kawasan kebun hutan pendidikan STIPER adalah suku Bugis sebesar 65%, sedangkan suku-suku lain adalah suku pendatang seperti Jawa dan lain-lain sebesar 35%. Dari segi agama, mayoritas warga Desa Karangany Hilir agama Islam .

4. Sejarah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Linus yang selaku Kepala Adat dan Atta Saleh selaku Ketua RT 08 desa Karangany Hilir, dijelaskan bahwa masyarakat sekitar kawasan kebun hutan pendidikan STIPER adalah merupakan pendatang dari suku Jawa, Bugis dari daerah yang berbeda untuk meminta ijin kepada pemerintah untuk mendirikan satu RT di wilayah sekitar kawasan kebun hutan pendidikan STIPER.

Dengan kondisi yang agak memencar, kehidupan penduduk tidak terlalu asing antara satu dengan yang lain, semangat persaudaraan/kekeluargaan, persatuan, ketertiban dan keamanan antara penduduk selalu terkoordinasi dengan

baik. Kehidupan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan semangat yang besar. Pada masanya, penduduk masyarakat sekitar kawasan kebun hutan pendidikan STIPER untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari harus membeli di kecamatan Karang Hilir dengan membawa hasil kebun dan hutan seperti kakao, sarang burung walet, madu dan buah-buahan menggunakan motor dengan waktu tempuh kadang-kadang sampai 20 sampai 30 menit tergantung keadaan jalan.

5. Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat sekitar kawasan kebun dan hutan pendidikan STIPER masih kental dengan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan siklus kehidupan (Hamil-Lahir/ dewasa/ berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian.

Masyarakat sekitar kawasan kebun dan hutan pendidikan STIPER juga masih menjadi kebiasaan dan membudayakan di kalangan masyarakat seperti menjenguk tetangga yang sakit, terkena musibah, membantu bersama-sama mendirikan rumah dan sebagainya. Kondisi kesehatan masyarakat sekitar kawasan kebun dan hutan pendidikan STIPER masih tergolong kurang pada saat ini, indikator yang dapat untuk perbandingan adalah pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada tenaga medis yang memberikan pelayanan persalinan dan sekarang sudah ada posyandu serta berkurangnya BALITA yang tergolong kurang gizi atau gizi buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Aipassa, M.I. 1998. Konservasi Lingkungan Hutan Tropis Lembap. Bahan Bacaan Mata Kuliah Konservasi Lingkungan Hutan Tropis Lembap. Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Aipassa, M.I. 2002. Program Pembangunan Nasional 2001-2005. Bahan Bacaan Mata Kuliah Konservasi Lingkungan Hutan Tropis Lembap. Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Anonim, 1990. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Anonim. 1999. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. Jakarta
- Arief, A. 1994. Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Bratawinata, A.A. 1997. Pengaruh Hutan dan Konservasi Hutan Tropis di Indonesia. Bahan Kuliah Program Studi Magister Ilmu Kehutanan. Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Effendi, O.U. 1984. Hubungan Komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Karya, Bandung.
- Hadi, A.P. 2001. Hubungan Antara Komunikasi Publik Perusahaan dan Sikap Komunitas Setempat (Kasus Perusahaan Pertambangan di Nusa Tenggara Barat). Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hilgard, E.R. 1978. The Goals of Perception. In: Kaplan, S (Ed.) 1978. Humanscape. Duxbury Press North Scituate, Massachusetts.
- Kayam, U. 1985. Pembahasan Makalah Persepsi Kebudayaan Utopia dan Realita. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. PT Gramedia, Jakarta
- Leavitt, H.J. 1978. Psikologi Manajemen. Penerbit Erlangga, Jakarta

- Lestari, S.N.W. 2004. Analisis Tingkat Kepuasan Pengunjung dan Implikasinya Terhadap Taman Bunga Nusantara Cipanas, Kabupaten Cianjur. Skripsi Fakultas Pertanian. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, IPB. Bogor
- Ngakan, P.O; H. Komarudin; A. Achmad; Wahyudi dan A. Tako. 2006. Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan, Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penerbit Center for International Forestry Research. Jakarta. <http://www.cifor.cgiar.org>
- Pranoto, H. 2001. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Penerepan Desentralisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal (Sebuah Studi di Kutai Kertanegara). Tesis Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Prayitno, R.T. 2008. Persepsi Masyarakat Tentang Keikutsertaan Wanita Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman Register 19 Gunung Betung. Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Rahmanto. B; I. Bambang dan K.A Nur. 2002. Persepsi Mengenai Multifungsi Lahan Sawah Dan Implikasinya Terhadap Alihfungsi Ke Penggunaan Non Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian, Litbang Pertanian. <http://ejournal.unud.ac.id/>
- Rakhmat, J. 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riduwan dan Sunarto, 2007. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan Bisnis. Pengantar Prof. Dr. H. Buchari. Alfabeta. Bandung
- Sangaji, A. 2002. Politik Konservasi Orang Katu di Behoa Kakau. (S. A. Awang (penyunting). KpSHK, Bogor.
- Sardjono, M.A. 1998. Interdependensi Sosial-Ekonomi Masyarakat Dengan Pembangunan Kehutanan dan Tekanannya Terhadap Sumberdaya Hutan di Kalimantan Timur. Laporan Penelitian. Kerja sama Penelitian Antara Balai Penelitian Kehutanan dan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda.

- Sembiring; F. Husbani; A.M. Arif; F. Ifalerina dan F. Hanif. 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. NRM Program.
- Simpoha, J.M. 1998. Masalah Pengakuan Formal atas Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Luar Jawa. Duta Rimba majalah Bulanan Perum Perhutani No. 213/XXII, Penerbit Perum Perhutani, Jakarta.
- Simon, H. 2001. Kehutanan Pasca Millenium 2000; Epistemologi Kehutanan Masyarakat. Komoniti 1 (1). h 4–7.
- Sirodz, A; M.A. Sardjono dan J.J. Hangueng. 2005. Persepsi Pengunjung tentang Lingkungan Rekreasi. Studi Kasus di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) dan Pulau Kemala Tenggara (PKT). Jurnal Kehutanan Unmul. 1 (1). April 2005: 1-11, 11h.
- Soemarwoto, O. 1987. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta.
- Uluk, A; M. Sudana dan E. Wollenberg, 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan Di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor
- Von Maydell, H.-J. 1989. Is Tropical Rain Forest More Impressive than Useful? Dalam Heuveldop, H.J. et al. (Eds.). 1989. GTZ Regional Forestry Seminar (Proceeding). GTZ. Korolevu
- Wahyuni, T. 2002. Analisis Kelayakan Financial dan Persepsi Masyarakat Dalam Kegiatan Konversi Lahan Alang-alang (*Imperiate cylindrica*) Dengan Sistem Agroforestry. Tesis Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Zain, A.S. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zakaria, R.Y. 1994. Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. WALHI, Jakarta.

Lampiran 1

Lembar Kuesioner untuk Masyarakat

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
- Rt/Rw :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Agama :
7. Pekerjaan Pokok :
- Pekerjaan Sampingan :
8. Berapa lama tinggal di kawasan Hutan STIPER:
9. Apakah penduduk asli di sekitar Hutan STIPER : (Ya)/(tidak)
 Jika tidak, dari mana asalnya :

B. Partisipasi Unsur Masyarakat Lokal dalam menjaga dan melestarikan kebun dan hutanSTIPER

1. Apakah anda mengetahui tentang kebun dan hutan STIPER ?
 a. Ya b. Tidak
2. Apabila ya, dari mana sumber informasinya ?
 a. petugas kehutanan
 b. tokoh masyarakat/adat
 c. sekolah, universitas
 d. surat kabar/majalah
 e. radio/ televisi
 f. lain-lain..... (sebutkan)
3. Sepengetahuan anda, apakah ada kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh STIPER Kutai Timur di desa Karang Hilir ?
 a. Ya b. Tidak
4. Jika ada, dalam bentuk dan hal apa sosialisasi tersebut?
 a.
 b.
 c.
 d.
 e. lain-lain
5. Siapa saja yang sejauh ini telah berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan kebun dan hutanSTIPER?
 a. Pemuda-pemudi

- b. Wanita
 - c. Kepala rumah tangga
 - d. Organisasi masyarakat seperti LSM
 - e. Aparat desa dan tokoh masyarakat
 - f. dan lain-lain
6. Apakah anda merasa senang dengan adanya kebun dan hutanSTIPER di desa Karang Hilir ini?
- a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah anda juga turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan/ program pelestarian kebun dan hutanSTIPER?
- a. Ya, mengapa ?
 - b. Tidak, mengapa ?
8. Jika Ya, dalam kegiatan apa saja anda terlibat ?
- a. Turut serta dalam menggunakan dan mendistribusikan fasilitas fisik (pemasangan tanda-tanda larangan dan peringatan, fasilitas lainnya), dana dan informasi
 - b. Turut serta dalam menjaga dan merawat fasilitas fisik yang ada
 - c. Turut dalam pelaksanaan pada rencana pendistribusian dan pemeliharaan fasilitas fisik yang telah dibuat
 - d. Turut dalam perencanaan program pelestarian kebun dan hutanSTIPER
 - e. Turut dalam manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) program pelestarian kebun dan hutanSTIPER
9. Jika Ya, bagaimana bentuk partisipasi anda dalam program Pelestarian kebun dan hutanSTIPER?
- a. Turut serta dalam memberikan informasi
 - b. Turut serta dalam memecahkan masalah (memberikan konsultasi)
 - c. Turut serta dalam pengambilan keputusan
 - d. Turut serta dalam memprakarsai tindakan
 - e. Turut serta dalam pengawasan
10. Bagaimana upaya anda untuk dapat mendukung keberhasilan pelestarian kebun dan hutanSTIPER Kutai Timur?